

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM APBD UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2018-2020)**

Nuzul Nikmatul Ula^{1*}, Risma Wira Bharata²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ nuzulnikmatul@gmail.com, ²⁾ rismawbmimo@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter. Dalam pendekatan analitis digunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa independensi Pemerintah Magelang dalam hal kemampuan keuangan masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, pemerintahan, pembangunan dan pembangunan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tingkat efektivitas dan efisiensi Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah tergolong kurang efektif. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dipandang telah melakukan pemborosan anggaran.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keuangan

Abstract

This study aims to assess the financial performance of the Magelang Regency government using financial ratio analysis based on the Realization Report of the Magelang Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2018-2020 Fiscal Year. The data collection method used is documentary. In the analytical approach, a quantitative approach is used by calculating the Regional Financial Independence Index, PAD Performance Index and Regional Financial Performance Index. Based on the results of the calculation and analysis of Regional Financial Performance, it can be concluded that the independence of the Magelang Authority Government in terms of financial capacity is still very low to meet regional financial needs. governance, social development and community development. activity. Serve. Therefore, the level of effectiveness and efficiency of Magelang Regency in regional financial management is classified as ineffective and ineffective. The Magelang Regency Expenditure Efficiency Index 2018-2020 shows that the Magelang Regency Government is seen as a budget waste.

Keywords: Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Financial Ratio

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan pengatur segala pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas (Saragih & Siregar, 2021). Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban fiskal daerah berupa laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Negara No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang melaksanakan amanat pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Penilaian situasi pengelolaan keuangan daerah akan menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Utomo, 2011).

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang posisi keuangan dalam semua transaksi pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk menilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintah, mengevaluasi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaporan (Suoth et al., 2016). Informasi perpajakan meliputi data dari berbagai bentuk pembiayaan, pengeluaran dan investasi kegiatan pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan daerah (Fathah, 2017). Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan kinerja pemerintah tanpa penyimpangan (Susanto, 2014). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat kinerja studi keuangan daerah di daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem keuangan. ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk suatu anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dalam bentuk rasio keuangan yang terbentuk oleh sistem pelaporan pertanggungjawaban daerah sebagai perhitungan anggaran (Fidel, 2012).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan yang dapat diperoleh dari data laporan keuangan. Rasio keuangan dapat mewakili kinerja keuangan seperti Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian. Inilah sebabnya mengapa analisis kinerja keuangan sangat penting karena dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja masa depan dalam hal arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kemampuan daerah untuk mengenali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menciptakan daerah yang bernilai tentunya menjadi sumber pendapatan. Pendapatan daerah membuat daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan dan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan (Prasetyo, 2022). Jika tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat, sehingga akan berdampak positif pada fungsi daerah. Hal ini karena semakin baik biaya modal yang digunakan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan adalah alat bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan perbandingan angka keuangan dan laporan keuangan. Menurut Sutrisno (2012), analisis laporan keuangan adalah alat yang menggabungkan unsur-unsur dalam laporan keuangan seperti berbagai jenis aset dari satu kewajiban ke kewajiban lainnya. Aset dan kewajiban, entri neraca dan entri akun laba rugi. Menurut Kuswulandari et al. (2016), analisis rasio keuangan pada dasarnya menciptakan rasio dengan memasukkan angka-angka antara laporan laba rugi dan neraca atau menjatuhkannya. Menurut Samryn (2015), menganalisis rasio keuangan adalah cara membandingkan data keuangan suatu perusahaan agar lebih bermakna.

2.2 Rasio Kemandirian

Laporan Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka dengan menjalankan operasi pemerintah, membiayai pembangunan mereka, dan melayani masyarakat dengan menaikkan pajak dan biaya bila diperlukan. Sumber pendapatan yang harus dibayar untuk daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan luar negeri daerah dan sebaliknya.

Tingkat kemandirian diukur sebagai:

$$\text{RKKD} = \text{PAD} / (\text{Penerimaan transfer}) \times 100\%.$$

Model hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak dapat mencapai otonomi daerah). Model hubungan partisipatif, peran pusat telah berkurang, karena diasumsikan bahwa daerah yang terlibat hampir tidak mungkin melaksanakan urusan otonomi daerah. Model hubungan delegatif, yakni intervensi negara pusat, sudah tidak ada lagi karena daerah benar-benar otonom dan mandiri.

2.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Kinerja PAD mendefinisikan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target PAD yang direncanakan berdasarkan potensi aktual yang ada di daerah. Semakin tinggi efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat efisiensi, maka semakin kurang efisien pemerintahan kota. Rasio Kinerja PAD dihitung dengan membandingkan hasil penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya.

Rumus untuk rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = (\text{PAD diterapkan}) / (\text{APBD Anggaran}) \times 100\%.$$

Menurut (Susanti et al., 2017), kriteria Rasio Efektifitas adalah: Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$), berarti tidak efektif. Jika diperoleh nilai 100% ($x = 100\%$), maka kinerjanya seimbang. Dikatakan efektif jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari 100% ($x > 100\%$).

2.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara total beban pokok penerimaan dengan realisasi penerimaan. Semakin rendah rasio efisiensi ekonomi daerah, semakin baik kinerja ekonomi pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk harmonisasi rasio menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi modal yang optimal untuk belanja saat ini dan pembangunan. Semakin tinggi rasio alokasi modal terhadap pengeluaran saat ini, semakin rendah proporsi modal investasi (pengeluaran pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan utilitas dan infrastruktur bagi Masyarakat. Ada dua cara untuk menghitung Rasio Keserasian ini: rasio belanja operasional dan rasio belanja modal. Rasio biaya operasional merupakan perbandingan antara total biaya operasional dengan total biaya area. Secara umum, proporsi beban usaha mendominasi total biaya daerah, berkisar 60-90%.

Rasio biaya operasional dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Biaya Operasional} = (\text{Total Biaya Operasional}) / (\text{Total Biaya Area}) \times 100\%.$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total investasi dengan total belanja daerah. Investasi membawa keuntungan dalam jangka menengah dan panjang serta secara teratur. Secara umum, porsi investasi belanja di daerah berkisar antara 5-20% (Fathah, 2017). Rasio belanja modal ini disusun sebagai berikut: rasio belanja modal = (total investasi) / (total belanja daerah) x 100%.

2.5 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2021), “Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mempelajari kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah”.

Menurut Ardila & Putri (2015) “Kinerja keuangan adalah salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.” Menurut Mardiasmo (2021), tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu:

1. Membantu alokasi sumber daya dan pendukung keputusan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi dalam organisasi

Menurut A Kadim et al. (2019), pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban daerah untuk dievaluasi. Perhitungan rasio-rasio keuangan merupakan alat ukur kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2018-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif, menurut Donmoyer & Donmoyer (2008), adalah metode penelitian eksperimental untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik, bukan dengan gaya naratif. Menurut Achmadi & Narbuko (2015), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana masalah yang ada dapat dipecahkan berdasarkan data.

3.2 Populasi dan Sampel

Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020 yang diambil dari data yang dipublikasikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dengan cara mengunduhnya dari website (<https://djpk.kemenkeu.go.es>).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD 2018-2020. Pemerintah Kabupaten Magelang, diambil dari data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Perimbangan Keuangan di situsnya (<https://djpk.kemenkeu.idi.id>).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang berupa gambar maupun dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang digunakan untuk merumuskan masalah dimana data dikumpulkan, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah saat ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	325.090.000.000	1.977.000.000.000	16%	Instruktif
2019	417.180.000.000	2.108.260.000.000	20%	Instruktif
2020	329.770.000.000	2.050.650.000.000	16%	Instruktif
Rata-rata		17,33%		

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 17,33%. Menurut Kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang ditulis oleh Halim (2001), tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sangat rendah, sehingga termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif berkisar antara 0% sampai dengan 20% dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu dari 2018-2020. Akan tetapi, pada tahun 2020 derajat kemandirian daerah Kabupaten Magelang relatif rendah, sehingga masuk dalam kategori pola hubungan konsultatif berkisar antara 20% sampai dengan 50%. Dalam model hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan/penting daripada independensi pemerintah daerah. Sementara itu, model hubungan konsultatif, seperti intervensi sentralisasi, semakin berkurang karena daerah dianggap lebih mampu membangun otonomi. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum dalam posisi terbaik untuk menggali potensi daerah.

4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas PAD
2018	325.090.000.000	354.250.000.000	92%	Cukup Efektif
2019	417.180.000.000	427.610.000.000	96%	Cukup Efektif
2020	329.770.000.000	406.100.000.000	81%	Kurang Efektif
Rata-rata		89,67%		

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, rata-rata tingkat efektivitas PAD Kabupaten Magelang selama periode 2018-2020 adalah 89,67%. Menurut Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang ditulis oleh Rahmawati & Mahmudi (2016), tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Magelang dinilai kurang efektif, berkisar antara 75% hingga 89% selama 3 tahun berturut-turut yaitu dari 2018 hingga 2020. Namun pada tahun 2018 dan 2020, tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Magelang cukup efektif, berkisar antara 90% hingga 99%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang cukup sesuai dengan target.

4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tabel 3 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2018	2.486.000.000.000	2.302.190.000.000	108%	Tidak Efisien
2019	2.568.590.000.000	2.575.440.000.000	100%	Tidak Efisien
2020	2.713.500.000.000	2.380.460.000.000	114%	Tidak Efisien

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022

Berdasarkan data yang tertera pada tabel, rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 107,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan rasio/porsi lebih dari 100%.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, beberapa hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 17,33% yang artinya Pemkab Magelang masih menunjukkan pola relasional instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah tidak memiliki mampu mewujudkan otonomi daerah secara finansial.
2. Rata-rata tingkat efektivitas PAD Kabupaten Magelang selama periode 2018-2020 adalah 89,67% yang artinya Pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal secara efektif dalam mengelola target PAD Pemerintah Kabupaten Magelang
3. Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 107,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan rasio/porsi lebih dari 100%.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Magelang maka saran untuk membantu Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain:

1. Untuk menaikkan rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Magelang harus sebisa mungkin mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada. Misalnya, potensi pendapatan bagi pemerintah daerah dapat dilihat di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, perdagangan, dll.
2. Untuk menaikkan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyusun strategi, memperkuat dan memperluas perpajakan, serta meningkatkan aspek

kelembagaan/pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan jumlah wajib pajak, menciptakan sumber pendapatan baru dan kebijakan sektor investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kadim, K., Adji, S., & Muhammad, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Rasio Lancar, Perputaran Persediaan Dan Margin Laba Kotor Terhadap Pemilihan Metode Persediaan Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 2(1), 18–30.
- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). *Metode Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Donmoyer, R., & Donmoyer, J. Y. (2008). Readers' theater as a data display strategy. *Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues*, 209–224.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Fidel, F. (2012). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Halim, I. (2021). *Analisis laporan keuangan*.
- Kuswulandari, I. R., Halim, A., & Mahsun, M. (2016). *Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten*. STIE Widya Wiwaha.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104>
- Rahmawati, R. A., & Mahmudi, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 122–130.
- Samryn, L. M., & SE, A. (2015). *Akuntansi Manajemen Edisi Revisi: Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi*. Prenada Media.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 43–53.
- Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal Of Accounting*, 3(3).

- Susanto, H. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Repository. Ut. Ac. Id.* <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>, 4.
- Sutrisno, A. S. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Utomo, D. P. (2011). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Educatio*, 6(2), 56–80.

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020)

Nuzul Nikmatul Ula1, Risma Wira Bharata
